

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berpenduduk 262 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas di seberang lautan, dalam rangka mewujudkan misi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan oleh UUD 1945, tentu akan menemui berbagai kendala. Ketika membahas masalah kesejahteraan umum, yang menjadi isu pokok dan terjadi di berbagai daerah di Indonesia yaitu adalah masalah kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya yaitu dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Salah satu bantuan sosial yang diberikan yaitu Program Keluarga Harapan yang biasa dikenal dengan PKH. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat bagi Rumah Tangga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang ditetapkan sebagai rumah tangga penerima manfaat PKH (Prichatin, 2019).

PKH telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai tahun 2007 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Skema jaminan sosial yang juga dikenal secara internasional sebagai Conditional Cash Transfers (CCT) telah terbukti berhasil dalam mengurangi kemiskinan, khususnya kemiskinan kronis, di negara-negara tersebut (Prichatin, 2019).

Kajian tentang kesejahteraan muncul dalam ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, karena umat Islam menjadi semakin giat untuk berusaha melaksanakan ajarannya. Paradigma ini menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dapat dicapai jika semua aktivitas manusia didasarkan pada syariat atau hukum Islam. Meski tidak semua percaya bahwa mereka akan tercapai dalam memecahkan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan masalah lainnya. Namun paradigma ini

memberikan pengertian yang benar mengenai alam semesta, langit, bumi dan segala isinya, termasuk manusia sebagai khalifah (Siregar, 2018).

Realitas dalam kehidupan adalah adanya kesenjangan ekonomi, perbedaan dan rezeki antar pelaku ekonomi sebagaimana itu adalah Sunnatullah. Dalam situasi seperti ini, mereka yang beragama akan menciptakan sistem ekonomi di mana mereka yang ekonominya lebih baik membantu mereka yang ekonominya lebih rendah sehingga kesenjangannya berkurang, meski tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya. Dengan cara demikian hanya dapat saling membantu dan memenuhi kebutuhan manusia, sebab yang kaya memerlukan yang miskin dan juga sebaliknya yang miskin memerlukan yang kaya. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin (neng kamarni, 2019).

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan” QS. An-Nisa' Ayat 135.

Menurut Islam, kemiskinan dianggap sebagai masalah hidup, bahkan bencana yang harus diberantas. Kemiskinan bukan sekedar ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi masalah budaya, dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruk seperti malas berusaha dan bekerja. karena itu, Islam menyarankan agar umatnya untuk bekerja keras serta selalu beribadah (Kartiawati, 2017).

Dalam agama kemaslahatan umat manusia juga di tekankan dalam konsep Maqasyid Syariah yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan. Segala sesuatu yang melindungi kelima unsur tersebut harus dilakukan (Faqihudin, 2022).

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka kesempatan untuk keluarga tidak mampu, khususnya ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan (fasdik) dan fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di sekitar

mereka. Manfaat PKH juga didorong untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) dengan tetap menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Dengan PKH, Keluarga Miskin (KM) didorong untuk mempunyai akses dan menggunakan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, gizi dan pangan, dukungan dan perawatan. Dan juga akses ke berbagai program tambahan secara berkelanjutan. PKH diharapkan menjadi center of excellence penanggulangan kemiskinan yang bersinergi dengan berbagai program jaminan dan pemberdayaan sosial nasional.

Mengingat per Maret 2016, penduduk miskin Indonesia masih mencapai 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta orang, maka misi utama PKH untuk mengentaskan kemiskinan semakin mengemuka (BPS 2016). Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah juga sudah menentukan target penurunan angka kemiskinan sebesar 7-8% pada tahun 2019. PKH diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi ketimpangan (gini rasio) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kementrian Sosial RI, 2019).

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan layanan sosial atau bantuan keuangan. Pendapat ini mengandung arti bahwa implementasi kebijakan melalui program pada esensinya memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Djumura, 2022).

Dan sebab utama terjadinya keterbelakangan ekonomi negara disebabkan oleh efisiensi atau produktivitas tenaga buruh yang rendah dibandingkan dengan negara maju. Efisiensi tenaga buruh rendah umumnya berasal dari kemiskinan yang terlihat dari standar gizi yang tidak mencapai kuantum, kesehatan yang buruk, buta huruf, dan tiadanya mobilitas pekerjaan dan pendidikan (Andika S., 2021).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun
2018-2022

No.	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kot (Ribuan-Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kerinci	16,79	17,00	17,46	18,45	18,20
2.	Merangin	33,95	32,88	33,92	35,44	34,14
3.	Sarolangun	25,70	25,39	25,79	27,06	26,23
4.	Batang Hari	27,55	26,53	26,54	27,24	26,24
5.	Muaro Jambi	17,38	16,86	17,30	20,49	20,64
6.	Tanjung Jabung Timur	26,99	25,35	24,23	24,42	23,42
7.	Tanjung Jabung Barat	36,28	35,12	34,78	36,10	33,95
8.	Tebo	22,86	22,83	22,47	23,77	22,81
9.	Bungo	21,11	20,87	22,07	23,64	20,69
10.	Kota Jambi	50,61	48,95	50,44	54,23	50,40
11.	Kota Sungai Penuh	2,48	2,55	2,78	3,03	2,64
Provinsi Jambi		281,69	274,32	277,80	293,86	279,37

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di kota jambi mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya seperti pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 50,61 ribu jiwa menjadi turun di tahun 2019 sebanyak 48,95 ribu jiwa dan ditahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan sebanyak 50,44 ribu jiwa dan 54,23 ribu jiwa kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 sebanyak 50,40 ribu jiwa.

PKH telah dilaksanakan di Kota Jambi sejak tahun 2012, dengan adanya PKH diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tangga prasejahtera dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat.

Kota Jambi adalah sebuah kota di Sumatera, Indonesia, dan ibu kota Provinsi Jambi. Kota Jambi dibelah oleh Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, dan kedua kabupaten tersebut dihubungkan oleh Jembatan Aur Duri. Kota Jambi dibatasi di sebelah utara, barat, selatan, dan timur oleh Kabupaten Muaro Jambi. Ketinggian rata-rata Kota Jambi adalah 0 hingga 60 meter. Kota Jambi terletak pada garis lintang 01°30'2.98" - 01°7'1.07" selatan dan garis bujur 103°40'1.67" - 103°40'0.23" timur. Kota Jambi terdiri dari 11 kecamatan, yaitu Telanai Pura, Pelayangan, Pasar Jambi, Pall Merah, Kota Baru, Jelutung, Jambi Timur, Jambi Selatan, Danau Teluk, Danau Sipin, Alam Barajo.

Tabel 1.2

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Kota Jambi Tahun 2018-2022

No.	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Alam Barajo	704	1374	1374	1297	1170
2.	Danau Sipin	1104	1784	1748	1688	1620
3.	Danau Teluk	874	830	781	758	741
4.	Jambi Selatan	1258	1146	1161	1107	1149
5.	Jambi Timur	2623	2368	2249	2172	2418
6.	Jelutung	1892	1766	1627	1560	1687
7.	Kota Baru	1536	1432	1483	1381	1530

8.	Pall Merah	1009	1932	1859	1706	1842
9.	Pasar Jambi	407	381	399	381	397
10.	Pelayangan	354	340	479	473	636
11.	Telanai Pura	1349	1308	1315	1273	1174
Jumlah		13.110	14.661	14.475	13.796	14.363

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah KPM PKH yang berbeda pada setiap Kecamatan di Kota Jambi setiap tahunnya ada yg mengalami kenaikan dan juga penurunan. Kota Jambi memiliki 11 Kecamatan, pada tahun 2022 Kecamatan Jambi Timur merupakan kecamatan terbanyak yang menerima manfaat PKH yaitu sebanyak 2.418 penerima dan jumlah penerima PKH yang paling sedikit ada di Kecamatan Pasar Jambi yaitu sebanyak 397 penerima.

Selama Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan di Kota Jambi, secara kasat mata kehidupan banyak masyarakat penerima bantuan ini belum banyak berubah dan masih banyak kekurangan dalam penyelesaian biaya hidup. Oleh karena itu keberadaan PKH tidak dapat diprediksi secara pasti apakah akan berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga penerima PKH di Kota Jambi. Dari penjelasan di atas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Jambi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan oleh penulis, maka penulis mengajukan pertanyaan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik penerima PKH di Kota Jambi?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH di Kota Jambi?

3. Bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan Penerima PKH?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik penerima PKH di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH di Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan Penerima PKH.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nilai ilmiah untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi lebih lanjut khususnya mengenai pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat dalam konteks perspektif ekonomi Islam di Kota Jambi dan akan dijadikan sebagai bahan kajian untuk pembelajaran selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk peneliti

Diharapkan penelitian ini akan menjadi ilmu pengetahuan dan informasi di bidang ekonomi dan diharapkan menjadi literatur ilmiah serta bahan bacaan bagi yang memerlukan.

- b. Untuk Dinas Sosial

Diharapkan menjadi salah satu bahan acuan perumusan kebijakan pemerintah untuk memperkuat penanggulangan kemiskinan dan penghidupan masyarakat.

c. Untuk masyarakat

Diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat, Program Keluarga Harapan bisa membantu mengurangi beban masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya.